

ABSTRAK

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko)

Oleh:

Patni ulan dari¹

Ummul Khair²

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian terdiri dari 20 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mukomuko. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 80 responden sebagai sampel penelitian. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert lima poin. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Good Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula, Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci; Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, GOOD GOVERNANCE, AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS

(Study on Regional Apparatus Organizations of Mukomuko Regency)

By:

Patni Ulan Dari¹

Ummul Khair²

Financial statement quality is an important indicator of accountability and transparency in local government financial management. This study aims to examine the effect of Government Accounting Standards, Good Governance, and Internal Control Systems on financial statement quality in Regional Government Organizations (OPDs) of Mukomuko Regency. This study employed a quantitative method with a survey approach. The population consisted of 20 Regional Government Organizations in Mukomuko Regency. Using a saturated sampling technique, 80 respondents were selected as the sample. Primary data were collected through questionnaires using a five-point Likert scale. The data were analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination using SPSS version 25.

The results show that Government Accounting Standards have a positive and significant effect on financial statement quality. Good Governance does not have a significant effect on financial statement quality. Similarly, Internal Control Systems do not have a significant effect on financial statement quality. Simultaneously, Government Accounting Standards, Good Governance, and Internal Control Systems have a significant effect on financial statement quality.

Keywords: Government Accounting Standards, Good Governance, Internal Control Systems, Financial Statement Quality

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko sebagai entitas pelaporan yang harus menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa setiap entitas pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik (Arista et al., 2023).

Sejalan dengan tuntutan akuntabilitas tersebut, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik, tetapi juga sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pemerintah daerah serta mendukung pengambilan keputusan (Ibrahim et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah.

Kualitas laporan keuangan menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan merupakan kemampuan laporan keuangan pemerintah dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018). Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik (Biduri et al., 2021; Indrayani & Widiastuti, 2020). Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan, semakin besar kepercayaan publik terhadap kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan penerapan standar dan sistem yang mendukung proses pelaporan keuangan secara konsisten, salah satu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pedoman yang mengatur prinsip dan prosedur pencatatan serta penyajian transaksi keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Penerapan SAP yang konsisten mendukung keseragaman dan keteraturan dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah (Yanti et al., 2020 ; Aminy et al., 2021; Sabo et al., 2024). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang menandakan bahwa efektivitas penerapannya bergantung pada pemahaman aparaturnya dan konsistensi dalam implementasi (Aimah et al., 2022; Julaiha et al., 2025).

Selain penerapan standar akuntansi, *Good governance* juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Good governance* merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan administrasi publik yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan (Majid, 2019). *Good governance* mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2021; Ibrahim et al., 2024). Namun, penelitian lain menemukan bahwa *Good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan (Era & Dwicaksono, 2023; Shofiyah et al., 2025)

Teori Agensi (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara principal dan agent dalam sektor publik, di mana agent memiliki kewenangan dan penguasaan informasi yang lebih besar sehingga berpotensi menimbulkan asimetri informasi (Wulandari, 2025; Purba, 2023). Kondisi ini dapat memicu konflik kepentingan dan perilaku oportunistik agent. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk membatasi perilaku tersebut (Herinda & Sulistiyowati, 2023) , serta menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian, Tabupook & Ika, (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian dan pelaporan yang efektif mampu meningkatkan akuntabilitas serta kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, Teori Agensi relevan digunakan untuk menjelaskan pentingnya

mekanisme pengawasan dalam meminimalkan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik.

Stewardship Theory memandang aparaturnya pemerintah sebagai *steward* yang bertindak untuk kepentingan organisasi dan masyarakat dengan dilandasi komitmen dan tanggung jawab moral, Donaldson & Davis, (1991). Kepatuhan terhadap regulasi, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) mencerminkan komitmen aparaturnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (Raharjo, 2023). Hal ini didukung oleh (Reswari & Nazir, 2022), yang menyatakan bahwa komitmen aparaturnya dan efektivitas pengendalian internal berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk menambahkan variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), Tabupook & Ika, (2024). Sistem Pengendalian Intern merupakan seperangkat prosedur dan kebijakan yang terintegrasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi, seperti efektivitas dan efisiensi kegiatan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan aset, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang (Utami & Berliani, 2024). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern, (Elvina et al., 2025; Kamandita & Suwandi, 2025; Ramadhan & Fahrani, 2024) yang mengindikasikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan. Namun, beberapa penelitian lain menemukan bahwa SPI tidak

berpengaruh atau berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sangat bergantung pada kualitas implementasinya (Ardini, 2023; Ramadhan & Fahrani, 2024).

Kasus pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko menunjukkan adanya dinamika antara capaian opini audit dan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Mukomuko secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga capaian tersebut penting untuk ditinjau secara berkelanjutan guna melihat pola pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, pencapaian opini WTP tidak serta-merta mencerminkan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan, Radar Utara (2025), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan implementasi prinsip *Good governance* di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa opini WTP lebih menekankan pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara material, namun belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran empiris mengenai keberlanjutan capaian opini audit tersebut, penelitian ini menyajikan data opini LKPD Pemerintah Kabupaten Mukomuko selama periode lima tahun terakhir, sebagai dasar untuk menegaskan bahwa meskipun opini WTP diperoleh secara

konsisten, masih terdapat tantangan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta penguatan *Good governance*. Gambaran capaian opini LKPD Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2020-2024

No	Tahun	Opini
1.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Hasil Radar utara 2025

Pemilihan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansi empiris dan urgensi penelitian. Kabupaten Mukomuko secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya sejumlah catatan perbaikan, khususnya terkait efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penerapan prinsip *Good governance* di tingkat OPD. Kondisi tersebut menjadikan OPD Kabupaten Mukomuko relevan untuk diteliti guna mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta upaya peningkatannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Meskipun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya sejumlah kelemahan, khususnya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “ **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko)**”, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi empiris serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Mukomuko belum sepenuhnya optimal meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada OPD Kabupaten Mukomuko belum dilaksanakan secara konsisten.
3. Penerapan *Good governance* pada OPD Kabupaten Mukomuko belum berjalan optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada OPD Kabupaten Mukomuko belum berfungsi secara efektif dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko yang berperan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen yang diteliti meliputi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian tetap terfokus pada analisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Mukomuko.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang dikaji, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko?
2. Apakah *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko?

4. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) , *Good governance*, Dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian sektor publik terkait pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris yang memperkaya literatur dan mendukung teori terkait pelaporan keuangan dan tata kelola sektor publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah: Kabupaten Mukomuko Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penguatan Standar Akuntansi Pemerintah SAP, *Good governance*, serta Sistem Pengendalian Intern SPI di seluruh OPD.
2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD): Menjadi dasar evaluasi dalam memperbaiki proses penyusunan, penyajian, dan pengendalian pelaporan keuangan agar menghasilkan informasi yang lebih relevan, andal, dan dapat dipercaya publik.
3. Bagi Peneliti (Mahasiswa): Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman ilmiah terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintah SAP, *Good governance*, dan sistem pengendalian intern SPI dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi dan acuan untuk penelitian berikutnya yang mengkaji variabel sejenis atau memperluas objek penelitian pada wilayah dan instansi pemerintah lainnya.

